

KEGIATAN DPR-RI MINGGU III NOVEMBER 2011

Kegiatan minggu ini diawali dengan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus dan Badan-Badan, khususnya dalam pembahasan RUU.

Berikut beberapa catatan kegiatan DPR-RI minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Pada pidato pembukaan Masa Persidangan II, Dewan akan menyelesaikan 13 RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. Ketigabelas RUU tersebut berasal dari inisiatif DPR maupun dari Pemerintah. Sepanjang tahun 2011 sampai 28 Oktober 2011, DPR telah menyelesaikan 22 RUU yaitu 18 RUU prioritas dan 4 RUU kumulatif terbuka. Telah pula diselesaikan 4 RUU yang memiliki nilai penting, yaitu RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang OJK, dan RUU tentang BPJS.

Untuk Masa Sidang sekarang, Pimpinan DPR telah bertemu dalam forum konsultasi dengan pimpinan Komisi dan Pansus-Pansus dalam kaitan dengan penyelesaian berbagai RUU yang diharapkan segera dituntaskan. RUU dibahas dalam pertemuan tersebut adalah: RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear-Tart-Ban Treaty* (Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir), RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pendidikan Tinggi, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, RUU tentang Perubahan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat, RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.



Dari berbagai RUU tersebut, yang diperkirakan pasti memasuki pembicaraan tingkat II, adalah RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan RUU tentang Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir.

RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditangani oleh Komisi III. RUU ini merupakan pengganti dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana. RUU ini juga merupakan tindak lanjut dari pengesahan konvensi hak-hak anak

(*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, yang telah ditandatangani tanggal 25 Agustus 1990,. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi bidang komunikasi dan informasi, kemajuan iptek, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat. RUU ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum. Substansi yang diatur, antara lain juga mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yang paling mendasar

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnu Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

dalam RUU ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yaitu menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

RUU tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeleksi Uji Coba Nuklir, antara lain menyatakan bahwa atas dasar Pembukaan UUD 1945, dalam rangka tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir. Indonesia berpandangan bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan perlucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir. Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia, sehingga resiko pecahnya perang nuklir menjadi keprihatinan internasional. Ancaman malapetaka nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia itu hanya dapat dihilangkan melalui penghapusan seluruh senjata nuklir. Pemerintah RI telah menandatangani *Comprehensive Nuclear-Tart-Ban Treaty* di New York pada 24 September 1996. Atas dasar itulah maka DPR perlu mengesahkan *Comprehensive Nuclear-Tart-Ban Treaty* dalam bentuk RUU untuk disahkan menjadi UU.

PENETAPAN PEJABAT PUBLIK

Penetapan pejabat-pejabat publik yang akan dilaksanakan dalam Masa Sidang II adalah penetapan calon Pimpinan KPK, pencalonan anggota BPK, pencalonan 2 Deputi Gubernur BI, pencalonan Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2011-2015, pencalonan anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI 2011-2015, dan pencalonan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

KEGIATAN DPR

Kegiatan DPR dalam minggu ini antara lain melaksanakan *special session* dengan UNESCO dengan judul *Special Session with UNESCO: Millennium Development Goals and Eradication of Poverty*. Hadir dalam acara ini Director General UNESCO, Ms. Irina Bokova, Resident Coordinator of United Nations in Indonesia, Mr. El-Mostafa Benlamih, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Muhammad Nuh, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs, Prof. Nila F. Moeloek, dan Special Envoy for Poverty Alleviation, Dr. HS Dillon.

Dalam sambutannya, Ketua DPR mengatakan bahwa pencapaian target tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* yang biasa disingkat MDGs, merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan dengan upaya Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan Pemerintah Indonesia pada Si-



dang Majelis Umum PBB ke-65 yang dilaksanakan bulan September tahun lalu di New York, mengungkapkan bahwa kinerja pencapaian target MDGs Indonesia telah sejalan dengan kinerja pencapaian target MDGs yang tercantum dalam Laporan Pencapaian MDGs Global 2010, sebagai evaluasi dilaksanakannya program MDGs selama 10 tahun.

Sampai dengan awal tahun 2011, Indonesia telah mencapai sebagian dari beberapa target MDGs, yaitu target MDGs 1 dalam hal mengurangi jumlah penduduk yang masih memiliki pendapatan per kapita dibawah US\$1; target MDGs 3 dalam hal meningkatkan kesetaraan gender di semua jenis dan jenjang pendidikan yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki; serta target MDGs 6 yaitu menurunkan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk.

Walaupun kinerja pencapaian MDGs di tingkat nasional dinilai sudah cukup baik, dan beberapa target MDGs di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun sebagian lagi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2015.

Beberapa kendala dalam pencapaian target MDGs 2015 antara lain, masih banyak kendala terkait dengan kemiskinan yang terjadi terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah yang jauh dari kota besar. Jauhnya jarak tempuh untuk menuju ke daerah tersebut menjadikan penduduk di daerah itu makin sulit mendapatkan akses kesehatan yang memadai, fasilitas air bersih yang mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, belum lagi bagi daerah-daerah yang rawan pangan dan bencana alam. Dalam konteks ini, harapannya adalah UNESCO dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang pelaksanaan *MDGs Programme* di Indonesia, sehingga UNESCO sebagai badan utama PBB dapat memberikan saran-saran dan bantuan teknis untuk ke-baikannya pelaksanaan *MDGs Programme* di Indonesia.

115 RUU Diusulkan Masuk RUU Prioritas 2012

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima 115 Rancangan Undang-Undang yang diusulkan untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012.



Ketua Baleg Ignatius Mulyono

RUU yang masuk tersebut dikategorikan menjadi RUU yang pernah diusulkan dalam Prolegnas 2010 dan 2011 sebanyak 65 RUU, RUU yang belum pernah diusulkan dalam Prolegnas 2010-2011 sebanyak 40 RUU dan RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas 2010-2014 sebanyak 10 RUU.

Demikian disampaikan Ketua Baleg Ignatius Mulyono pada rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Rabu (23/11) dengan agenda rapat penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2012.

Mulyono mengatakan, sebelumnya Baleg DPR telah menerima 166 RUU sebagai bahan Prolegnas RUU Prioritas 2012. Usulan tersebut, 25 RUU dari DPD, 88 RUU usulan Komisi, 11 RUU usulan Baleg, 34 RUU usulan Fraksi, 1 RUU usulan Anggota DPR dan 7 RUU usulan masyarakat.

Namun, kata Mulyono, setelah dikurangi judul RUU yang sama, jumlah tersebut menjadi 115 RUU.

Terhadap evaluasi Prolegnas Prioritas 2011, Mulyono menyampaikan dari 70 RUU Prioritas 2011, 22 RUU telah disahkan menjadi UU (4 RUU kumulatif terbuka), 16 RUU dalam tahap pem-

bicaraan Tingkat I, 2 RUU dalam tahap menunggu Surat Presiden, 2 RUU selesai proses harmonisasi oleh Baleg, 1 RUU tahap harmonisasi oleh Baleg dan 27 RUU tahap penyusunan di Pemerintah.

Diperkirakan sampai berakhirnya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 ada penambahan RUU

yang dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPR bersama Pemerintah minimal 8 RUU.

Dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2012, Baleg berharap disamping memperhatikan target lima tahunan juga memperhatikan kemampuan dalam menyelesaikan RUU di tahun 2011 dan tentunya juga tetap memperhatikan aspek kualitas (mutu), sehingga dapat meminimalisir UU yang telah disahkan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada kesempatan tersebut, anggota Baleg Rahadi Zakaria mengingatkan kepada Pemerintah RUU yang sangat mendesak untuk segera dilakukan pembahasan yaitu RUU tentang Desa.

Rahadi minta Menkumham dan jajarannya dapat menjadi katalisator agar RUU itu dapat segera dibahas bersama-sama dengan DPR.

Sementara, anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, hal yang perlu mendapat perhatian, daftar RUU Prioritas 2012 harus betul-betul urgent dan momentumnya tepat. Walaupun yang diusulkan banyak, namun harus ada skala prioritas untuk jangka pendek atau jangka menengah.

Baik DPR maupun Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap capaian legislasi dan mencari titik-titik mana yang perlu dilakukan perbaikan. "Mentargetkan banyak produk itu baik, tapi yang harus diperhatikan juga kualitasnya," kata Bukhori.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan, dari pihak Pemerintah berencana akan mengusulkan RUU Prioritas 2012 sebanyak 29 RUU.

Dari 29 RUU tersebut terdiri atas, 8 (delapan) RUU prakarsa Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses pembahasan Tingkat I di DPR, 4 (empat) RUU dari sisi teknis pernah disampaikan ke Presiden dan saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan substansi di kementerian pemrakarsa, 7 (tujuh) RUU yang sudah selesai proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan 10 RUU sedang dalam tahap akhir proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait dengan mekanisme evaluasi, Pemerintah mengusulkan agar Baleg bersama-sama dengan Pemerintah dapat menyusun suatu mekanisme evaluasi yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan perencanaan legislasi dan evaluasi legislasi menjadi suatu bentuk mekanisme yang bersejawa dan paralel.

Pemerintah juga sependapat dengan Baleg DPR untuk terlebih dulu melakukan evaluasi terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2011, sehingga dapat bersikap realistis dan rasional dalam melakukan penyusunan Prolegnas tahun depan.

Amir juga berharap, dalam penyusunan Prolegnas mendatang dapat terus ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terpadu dan sistematis di kemudian hari. (tt) foto: tim parle

Profesi Guru Sudah Mulai Jadi Favorit

Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, pilihan kuliah di perguruan tinggi keguruan sering menjadi pilihan kedua, ketiga dan seterusnya.

Namun sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap guru, diberlakukannya program sertifikasi, bertambahnya penghasilan dan kesejahteraan, minat untuk menjadi tenaga pendidik cenderung meningkat.

“Saya dapat masukan calon mahasiswa jurusan keguruan di beberapa perguruan tinggi cenderung naik. Ini karena meningkatnya minat menjadi guru karena kesejahteraannya sudah lebih baik. Tapi guru punya tantangan baru setelah sertifikasi dan peningkatan penghasilan, jangan melupakan tanggung jawab sebagai pendidik,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat bicara dalam acara Seminar Nasional dalam rangka HUT PGRI di Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (20/11).

Memasuki usia PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) ke 66 tahun, organisasi profesi ini diminta melakukan introspeksi untuk menemukan solusi bagi beragam persoalan bangsa yang merupakan hasil pendidikan masa lalu. “Bangsa ini memiliki masalah dengan keteladanan, semakin sedikit tokoh yang dapat diteladani. Hasil pendidikan masa lalu yang juga harus jadi perhatian para guru adalah bagaimana mengalahkan musuh terbesar dalam membangun bangsa, yaitu korupsi,” lanjutnya.

Korupsi lanjutnya sudah merasuk ke dalam tatanan bangsa bahkan kepada generasi muda. Dihadapan para guru peserta seminar, Marzuki bercerita tentang pengalamannya memberikan tantangan kepada 30 Organisasi Keperemajaan (OKP) yang akan mengikuti Kongres KNPI yang baru saja berlangsung. “Saya sudah ajak mereka untuk berkongres dengan idealisme, tapi ternyata tidak berhasil dari 30 OKP yang minta restu ternyata yang mampu bertahan hanya 4 OKP saja,” imbuhnya.

Ia berharap para guru dapat mengemban tugas membawa anak bangsa untuk terus berada dijalur yang benar dan membesarkan bangsa ini. “Masing-masing kita punya kewajiban pada bangsa. Saya juga ada, bagaimana membawa DPR menjadi lembaga yang



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menjadi pembicara di Seminar Nasional HUT PGRI di Banyumas, Jateng

amanah. Banyak kepentingan di DPR itu, tapi saya tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah,” papar Marzuki disambut tepuk tangan peserta seminar.

Rangkaian Seminar Nasional dalam rangka menyambut HUT PGRI ini berlangsung tiga hari 19 – 21 Nopember di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu Cilacap, Banyumas, Tegal, Purbalingga dan Banjarnegara. Gedung

PGRI atau Pendopo Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan selalu dipenuhi oleh para guru yang sebagian besar datang dengan seragam PGRI. “Kalau menyangkut guru, saya selalu berusaha hadir memenuhi undangan karena tanggung jawab membentuk bangsa ini ada di tangan guru,” kata Ketua DPR yang didaulat mengenakan seragam batik PGRI dalam setiap seminar.



Terima Aspirasi

Dalam sesi tanya jawab Wahyu guru SD Tunas Harapan Hidup Kita, Tegal menyampaikan aspirasi terkait siaran televisi yang tidak mendidik. “Sebagai guru kita telah berupaya mengajarkan perilaku yang baik dan benar kepada anak, namun saya prihatin apa yang telah kita ajarkan itu dirusak oleh tayangan televisi yang tidak mendidik. Saya meminta Ketua DPR memberi perhatian terhadap kondisi ini,” katanya.

Adapula guru yang menyampaikan aspirasi menyangkut tidak transparan dan berlarutnya proses sertifikasi guru. Anshir guru SDN 1 Kranji mengaku belum menerima tunjangan, padahal sudah dinyatakan lulus dari serangkaian ujian sertifikasi tahun 2010 lalu. Sementara Hariyadi Kepala SMP negeri 1 Maos, mempertanyakan komitmen Ketua

DPR dalam memberantas korupsi.

Ketua Umum PB. PGRI Sulistyono yang hadir sebagai pembicara menyampaikan masukan terkait rencana pemerintah melakukan moratorium pengangkatan PNS. Ia secara khusus meminta kebijakan itu tidak berlaku pada guru. “Sebaiknya tidak ada moratorium pengangkatan guru. Kami masih minta dicek betul jumlah guru karena laporan kekurangan masih kami terima,” jelasnya. Ia berharap pemerintah dapat memberikan kado pada Hari Guru nanti dengan menetapkan gaji minimal guru non-pns. “Masih ada guru yang dibayar dibawah UMR.”

Menjawab permasalahan itu Marzuki menyebut demokrasi yang berkembang di tanah air memberikan kebebasan kepada media. Namun menurutnya kebebasan itu tidak dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

Upaya mengawasi media juga sudah dilakukan salah satunya dengan membentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang tersebar diseluruh daerah di tanah air. “Hanya saja anggota KPID digaji setara UMR mana mungkin berdaya menghadapi pelaku industri media. Saya beberapa kali ketemu anggota KPID di Jakarta yang mendapat undangan media televisi besar, semua biaya perjalanan ditanggung,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini berjanji akan segera menindaklanjuti masukan yang diterimanya. Ia secara khusus akan berkirim surat kepada KPI Pusat. “Saya akan katakan guru kita keberatan dengan beberapa tayangan televisi, dan tembusannya akan disampaikan ke seluruh media,” tandasnya. (iky) foto: ik/parle

Ketua DPR Terima Dubes Korea Utara

Kunjungan kali ini merupakan kunjungan pertama kalinya Duta Besar Korea Utara, H.E. Mr. Jong Ryul ke DPR RI dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang ditemani oleh Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid di Ruang Pimpinan, Nusantara III, Rabu (23/11).



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan Duta Besar Korea Utara H.E. Mr. Jong Ryul

Jong Ryul menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Asean 2011 dan dia sekaligus menyampaikan rasa terima kasihnya atas waktu yang telah diberikan oleh Marzuki Alie, ditengah-tengah kesibukannya.

“Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Asean pada tahun ini, dan kami berharap Indonesia dapat memerankan perannya sebagai Ketua Asean dengan sebaik mungkin dan yang terpenting dapat memperkokoh negara-negara yang ter-

gabung dalam Asean,”terangnya.

Dalam pertemuan tersebut Jong Ryul mengatakan, hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Korea Utara telah berlangsung sejak lama, sehingga dia sangat berharap agar hubungan yang terjalin akan semakin erat antar kedua Negara.

“Hubungan antara Indonesia dan Korea telah terjalin sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, oleh karena itu kami berharap agar hubungan bilateral yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara pertukaran delegasi antara Indonesia dengan Korea Utara dengan tujuan untuk menunjang hubungan persahabatan antara kedua negara ini,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki Alie menyambut baik dan dia yakin dengan kedatangan Jong Ryul saat ini pun akan berpengaruh bagi hubungan kedua negara. “Tentunya pertemuan saat ini pun akan mempererat hubungan antara kedua negara,” katanya. (ra) foto:ry/parle

Komisi II DPR Minta Kemendagri Beri Pendampingan dan Pembinaan Untuk Papua

Komisi II DPR meminya Kementerian Dalam Negeri memberikan pendampingan dan pembinaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Pendampingan tersebut dibutuhkan demi pembangunan untuk masyarakat Papua,”kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11).

Tidak hanya itu, dalam kesempatan rapat kali ini, Komisi II juga meminta

upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, diantaranya dengan ditetapkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, serta Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat,”jelas Mendagri.



Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap (atas)

Mendagri senantiasa melakukan pengawasan dialog dan koordinasi guna mendorong peningkatan keamanan, kesejahteraan, penegakan hukum dan HAM, serta evaluasi alokasi dan penggunaan dana otonomi khusus.

Menanggapi hal tersebut Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa di Papua saat ini tengah terjadi gejolak sosial, politik dan keamanan, dan pemerintah saat ini sedang mendalami dengan cermat akar permasalahan di Papua guna menyusun arah kebijakan dan penyelesaian permasalahan dimasa mendatang.

“Saat ini telah dilakukan berbagai

Pada lingkup Kementerian Dalam Negeri, tambah Mendagri, sedang dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, serta menyusun kegiatan pengembangan kapasitas jajaran pemerintahan daerah.

Selain itu lanjutnya, juga dilakukan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi penyusunan legislasi, dan penguatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

Mendagri menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 9 Desember akan ditandatangani nota kesepahaman kerja sama

dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, “Kerja sama ini berbentuk kesempatan yang diberikan Kemdagri menjadi tempat magang bagi pejabat dan pegawai negeri sipil dari kedua wilayah tersebut dan Kemdagri siap memberikan pelatihan, bimbingan, asistensi, supervisi, dan penyiapan program pembangunan,”terangnya.

Mendagri juga menyebutkan pada 2011 ini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertempat di Papua akan diresmikan. Sebanyak 176 putra-putri Papua dan wilayah Indonesia bagian Timur akan menerima pendidikan di institut tersebut.(nt)foto:parle

Komisi VII DPR Melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Ke Dumai, Provinsi Riau

Tim Kunjungan spesifik Anggota Komisi VII DPR ke Dumai Propinsi Riau yang dipimpin Sutan Sukarnotomo, meninjau tiga Perusahaan yang dinilai telah mencemari lingkungan setempat. Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Nopember 2011.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR saat meninjau PT Pertamina di Dumai Provinsi Riau untuk memberikan penilaian mengenai pencemaran lingkungan

Kunjungan tersebut juga diikuti empat orang anggota DPR antara lain, H. Sutan Sukarnotomo sebagai ketua Tim (FPD), Ir. Alimin Abdullah anggota (FPAN), Hj. Irna Narulita anggota (FPP), dan Drs. M Ali Kastella anggota (F.Hanura).

Ketua Tim Sutan Sukarnotomo mengatakan bahwa PT Pertamina Persero secara fisik sudah memuaskan bahwa semua sistem pembuangan limbahnya sudah sesuai dengan prosedur serta betul-betul memperhatikan lingkungan setempat.

Sutan mengatakan bahwa, ada 3 perusahaan swasta yaitu PT Wilmar Group, PT Cakra Alam Makmur dan PT Surya Dumai dinilai sangat kotor dan betul-betul tidak mencerminkan suatu perusahaan yang sehat, dan ada laporan masyarakat bahwa disana terdapat pencemaran udara, menghasilkan emisi karbon yang tinggi yang dikeluarkan dari cerobong perusahaan tersebut.

Dikatakan juga, bahwa PT Wilmar

Group tersebut juga telah dilaporkan oleh masyarakat setempat, bahwa PT tersebut telah mencemari lingkungan namun dari PT Wilmar tersebut tidak mengindahkan laporan dari masyarakat sehingga anggota Komisi VII DPR melakukan peninjauan kelengkapan dan telah dibuktikan memang ada kebocoran cairan limbah yang hingga kini belum terselesaikan.

Ketua Tim Sutan Sukarnotomo juga mengemukakan bahwa pengolahan limbahnya kurang bagus yang hanya satu bak saja, sisanya dibuang kelaut paling banyak 2 kali proses, sementara pihak Pertamina melakukan 5 kali proses pengolahan yang kemudian dibuang ke laut.

Sutan juga menegaskan bahwa PT Surya Dumai dan PT Cakra Alam Makmur dalam memproses pembuangan limbahnya sangat kurang karena dia hanya mengolah 1 kali proses dan tidak jelas limbah apa yang dihasilkan, bahkan menurut masyarakat setempat Perusahaan tersebut sebelumnya

membuang limbahnya kelaut, serta stok bahan bakunya luber yang kemudian dibuang kesungai yang sering dipergunakan oleh masyarakat. Sebelumnya sudah pernah dihimbau untuk dibersihkan namun tidak dihirau hingga sekarang, tegas Sutan.

Ketua Tim Sutan Sukarnotomo juga mengatakan bahwa masalah ini akan dibawa kerapat Komisi VII DPR, dan tindakan penanganan tergantung juga dari hasil rapat dengan merekomendasikan untuk melakukan pemanggilan pada pihak yang bertanggung jawab ke Jakarta dan kalau perlu diberikan sanksi.

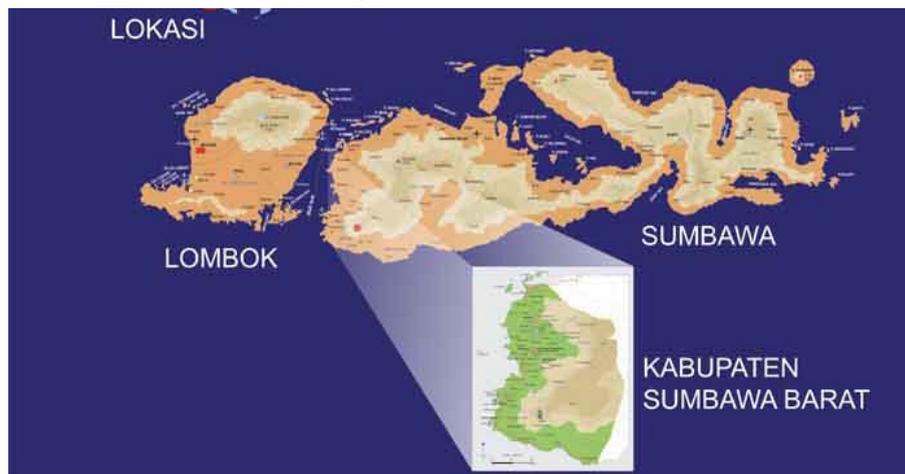
Sutan juga menegaskan bahwa mereka tidak welcome dengan kedatangan anggota Tim Komisi VII DPR kesini, kemudian setelah kembali ke Jakarta, Komisi VII DPR akan segera memanggil ke tiga Perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap masyarakat. (Spy). foto:sp/parle

Komisi II DPR Pantau Daerah Otonom Baru di NTB

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi Nusa Tenggara Barat, berupaya memantau pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk melihat sejauh mana efektivitas pemekaran wilayah tersebut.



Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap



Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap (F-PG) saat pertemuan dengan jajaran pemerintah kabupaten Sumbawa Barat. “Tujuan kunjungan Komisi II kali ini, yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonomi baru, dan melihat bagaimana dukungan masyarakat dalam pembangunan,” ujar Chairuman saat wawancara sejumlah wartawan.

Tim Komisi II yang berkunjung ke NTB dipimpin oleh Ketua Komisi Chairuman Harahap (F-PG), didampingi Wakil Ketua Komisi, Abdul Hakam Naja (F-PAN) dengan anggota: Drs. Ramadhan Pohan (F-PD), Gede Pasek Suardika (F-PD), Khatibul Umam Wiranu (F-PD), Rusminiati (F-PD), Ir. Basuki Tjahaja Purnama (F-PG), Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus (F-PG), Eddy Mihati (F-PDIP), Hermato (F-PKS), Drs.H.Rusli

Ridwan (F-PAN), Drs. H. Nu'man Abdul Hakim (F-PPP), Abdul Malik Haramain (F-PKB), Drs. H. Harun Al Rasjid (F-GER-INDRA).

Chairuman mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah yang dimekarkan khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak tahun 2004 Kabupaten Sumbawa Barat berkembang cukup pesat dengan tingkat pelayanan publik yang semakin baik. Salah satu indikasi dari kemajuan adalah meningkatnya jumlah mahasiswa yang belajar di sejumlah perguruan tinggi. “Dengan kemampuan ekonomi masyarakat semakin baik, diharapkan SDM di Sumbawa Barat akan menjadi lebih baik di masa datang,” kata Chairuman.

Program E-KTP

Selain melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke NTB datang untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program E-KTP dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja saat melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi. Hakam Naja mengatakan, dibutuhkan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan 170 juta penduduk yang wajib memiliki E-KTP. Program ini telah dimulai secara nasional sejak bulan Agustus 2011 lalu. Diharapkan dapat terlaksana secara efektif selama 3-4 bulan. Namun Hakam Naja menyayangkan pelaksanaan program E-KTP di NTB yang sedikit tersendat, dikarenakan tidak maksimalnya ketersediaan alat. “Saya kira memang berat, melihat kasus di Kecamatan Praya, Lombok Tengah, karena alat yang tidak maksimal, oleh karena itu saya pikir manajemen perlu diperketat di tahun 2012” ujar Abdul Hakam Naja. (Doni/ Tv Parle)

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Industri Pertahanan Dan Keamanan Diajukan Ke Paripurna

Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Keamanan diajukan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI.



Penandatanganan persetujuan RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan oleh Fraksi di DPR RI

Hal ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada Rapat Pleno Baleg pengambilan keputusan terhadap pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, Senin (21/11) yang dipimpin Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono.

Dalam pandangan mini Fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa catatan penting yang disampaikan diantaranya adalah RUU ini hendaknya menunjukkan dukungan yang jelas dan tegas akan kemandirian negara dalam memenuhi kebutuhan akan peralatan pertahanan dan keamanan dalam rangka mewujudkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang tangguh.

Kedudukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam mengenai posisi kelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.

Selain itu, RUU ini harus ada pengaturan yang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kesan bahwa RUU ini mereduksi ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan yang terlalu berlebihan kepada Kementerian Pertahanan dalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Catatan penting lain yang diberikan F-PDI Perjuangan adalah tanggung jawab penuh terhadap pertahanan keamanan bangsa dan negara adalah di tangan Presiden sehingga terhadap keberadaan KKIP seharusnya juga diketuai Presiden bukan Wakil Presiden.

Fraksi PAN menyampaikan secara tegas menyetujui terhadap ide dan gagasan diajakannya RUU ini. Mengingat tujuan berbangsa dan bernegara yang sudah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, maka dalam rangka melakukan fungsi itu diperlu-

kan satu sistem pertahanan keamanan yang kuat.

Sementara Fraksi PPP memberikan beberapa catatan yaitu perubahan judul RUU tersebut yang sebelumnya RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional diubah menjadi RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, menurut Fraksi PPP hal ini sejalan dengan filosofi UUD 1945 Pasal 30 yang tidak membagi dan memisahkan aspek pertahanan dengan keamanan negara sebaliknya konstitusi justru mengintegrasikan ke dua aspek tersebut dalam bentuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

F-PPP juga memberikan catatan keterlibatan industri swasta nasional untuk melakukan pengadaan, pemasaran dan lain-lain dari alat peralatan pertahanan dan keamanan negara dapat diterima sepanjang dilakukan pengawasan yang ketat dan dilakukan hingga jangka waktu tertentu.

Juru bicara Fraksi PKB menyampaikan, secara garis besar F-PKB menyetujui RUU ini yang telah banyak mengakomodir berbagai problem faktual yang dipaparkan demi peningkatan dan kemandirian industri strategis pertahanan nasional baik pada aspek kelembagaan, penganggaran dan pengembangan serta riset.

F-PKB merasa perlu ada penegasan yang lebih detail serta mengikat terhadap pemerintah terkait dengan persoalan pembiayaan tersebut mengingat banyaknya UU yang telah berlaku terbelengkalai karena tidak adanya aturan teknis yang menunggu Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pengawasan, F-PKB menilai masih sangat umum padahal pengawasan oleh DPR sangat penting dan tidak ada penjelasan yang memadai dalam mengurai bab pengawasan ini. Pengawasan ini juga perlu melibatkan masyarakat terutama lembaga independen dan kalangan akademisi.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan mini fraksi menyampaikan selama

ini industri pertahanan dan keamanan belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan secara mandiri yang menyebabkan masih adanya ketergantungan produk pertahanan keamanan dari luar negeri atau pihak asing.

Dengan alasan tersebut, maka pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan membutuhkan ketersediaan peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam negeri, pemilikan teknologi canggih dan penguasaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk kemandirian bangsa Indonesia.

Untuk itulah RUU ini meminimalisir atau bahkan untuk menghilangkan ketergantungan kepada pihak asing dalam pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan.

Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan KKIP dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Senada dengan F-PG, F-PKS dalam pandangan mini fraksinya juga menyampaikan bahwa sebagai negara yang mempunyai letak yang strategis di Asia, Indonesia memiliki permasalahan dalam melayani dan melindungi wilayahnya dari potensi ancaman yang muncul.

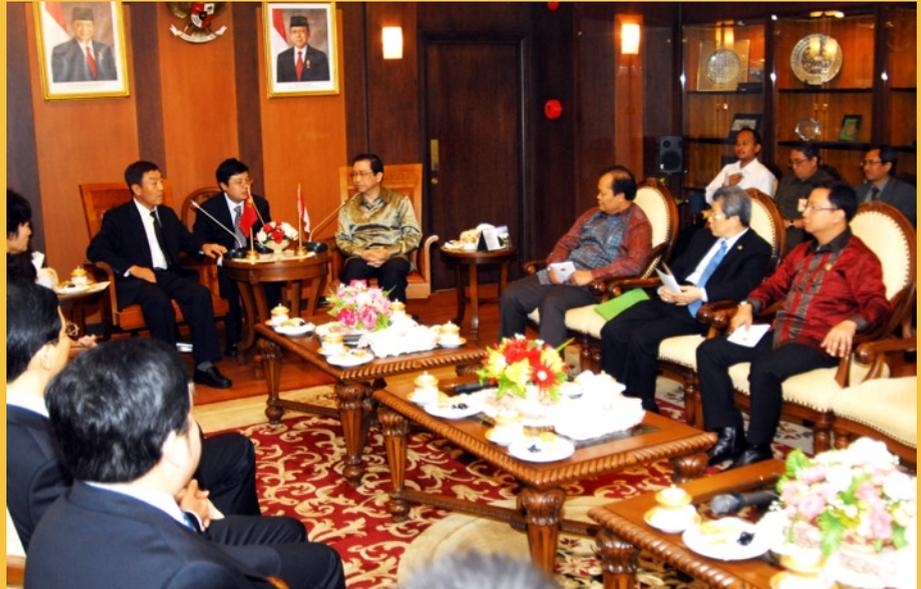
Masalah tersebut antara lain karena ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri secara optimal sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan luar negeri.

Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan dan keamanan nasional belum sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu, RUU ini muncul karena keprihatinan terhadap situasi dan kondisi alutsista TNI yang tidak memadai di lapangan. Terdapat paradoks antara paham zero enemy dengan minimum essential cost sehingga menyebabkan industri kita tidak berkembang.(tt) foto:ry/parle

Ketua Komisi Ekonomi Parlemen China Temui Ketua DPR Ketua Komisi Ekonomi Parlemen China Temui Ketua DPR

Ketua Komisi Ekonomi Parlemen Cina, Wu Ritu yang ditemani 6 orang delegasi lainnya menemui Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang didampingi oleh Ketua GKSBI Indonesia-China, Albert Yaputra (F-PD) dan Andi Anzhar Cakra Wijaya (FPAN) di Ruang Tamu Pimpinan, Nusantara III, Rabu (23/11).



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi oleh Ketua GKSBI Indonesia -China Albert Yaputra dan Andi Anzhar Cakra Wijaya saat menerima Ketua Komisi Ekonomi China Wu Ritu

Dalam kunjungannya kali ini, Wu Ritu mengatakan, ingin adanya peningkatan kerjasama di kedua negara dalam berbagai sektor.

Wu Ritu memuji prestasi hubungan bilateral yang telah terjalin sejak lama dengan Indonesia, yang merujuk dengan meningkatnya kepercayaan politik, kerja sama perdagangan dan pertukaran budaya yang meluas.

“Kami menginginkan kerjasama ini dapat terus terjalin dengan baik, agar kedua negara dapat saling menguntungkan satu sama lain atas kerjasama-kerjasama yang terjalin di kedua negara,” jelas Wu.

Wu Ritu berpandangan, kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan China pada saat ini dalam posisi yang paling baik. “Sepanjang sejarah kerjasama diantara kedua negara, pada saat ini adalah pada posisi yang terbaik,” katanya.

Dia menambahkan, kerjasama ekonomi yang terjalin diantara kedua ne-

gara bukan saja baik bagi masyarakat di kedua negara tetapi baik juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Asean.

“Kami berharap agar dapat dilakukan pertukaran delegasi diantara kedua negara yang lebih bersifat regular untuk memperkuat kerjasama yang terjalin di kedua negara dan menyuntikan vitalitas baru ke dalam hubungan diantara kami secara keseluruhan,” harapnya.

Menanggapi keinginan Ketua Komisi Ekonomi Parlemen China tersebut, Marzuki Alie mengatakan, akan menindaklanjutinya melalui Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-China yang telah terjalin. “Kami akan segera menindaklanjuti keinginan untuk memperkuat hubungan yang terjalin antara Indonesia-China yang tentunya akan melalui GKSBI yang akan mengkoordinir mengenai mekanisme kerjasama-kerjasama yang akan dijalin lebih dalam,” jelasnya. (ra) foto:ry/parle

DPR Minta BPK Tuntaskan Audit Forensik Century Lebih Awal

Tim Pengawas Century DPR RI menyampaikan apresiasi atas perkembangan audit forensik yang dilakukan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang kemajuannya sudah mencapai 60 persen.

Sesuai Term of Reference (TOR) BPK dijadwalkan menyelesaikan seluruh audit selama 150 hari kerja namun Timwas meminta percepatan audit sehingga dapat tuntas sebelum masa persidangan kali ini berakhir.

“BPK punya batasan sesuai undang-undang harus menyelesaikan audit pada 23 Desember nanti. Tapi kita meminta dipercepat harapannya sebelum akhir masa persidangan DPR kali ini tanggal 16 Desember, kita berharap betul ini tuntas. Respon BPK tadi harus melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia karena mandatori BPK dalam audit forensik ini dari BI,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai memimpin rapat Timwas Century dengan Pimpinan BPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/11).

Taufik juga menjelaskan Tim Pengawas Century akan memasuki akhir mandat sesuai kewenangan yang diberikan rapat paripurna yaitu selama satu tahun. Ia berharap pada tanggal 7 Desember nanti Timwas sudah dapat menyelesaikan laporan kinerja dan menyampaikannya pada rapat paripurna. Menjawab pertanyaan wartawan apakah masa kerja Timwas perlu diperpanjang, ia menyebut kewenangan ada pada putusan anggota pada rapat paripurna nanti. “Semua kita kembalikan kepada paripurna, karena mandatori Timwas-kan dari paripurna. Saya rasa pada saat agenda ini dibahas Bamus sudah akan terjadi perdebatan perlu diperpanjang atau tidak,” lanjutnya.

Politisi PAN ini menegaskan laporan kinerja yang disusun oleh Timwas tidak akan bergantung pada hasil audit forensik BPK yang saat ini masih berlangsung. Laporan nantinya mengacu pada seluruh hasil pengawasan yang dihimpun dari rangkaian pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Ia menekankan DPR punya mekanisme sendiri sesuai



Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan

tata tertib.

Dalam rapat dengan Timwas, Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan tujuan audit yang dilakukan kali ini adalah menemukan transaksi yang tidak wajar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Bank Century (BC) dan/atau Negara dan/atau masyarakat, baik sebelum maupun sesudah BC diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan. “Audit juga akan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut,” paparnya.

Auditor BPK sejauh ini telah memeriksa 86.820.186 transaksi. Dari jumlah tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria nilai transaksi di atas Rp. 400 juta atau transaksi yang berindikasi tidak wajar berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya atau informasi lain yang diperoleh Tim. Dengan menggunakan kriteria Rp. 400

juta ditemukan 469.076 transaksi. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, Tim auditor berkesimpulan terdapat 2.828 nasabah dengan jumlah 4000 rekening yang dilakukan pengujian lebih lanjut.

Ia juga mengungkap dalam pemeriksaan lanjutan yang dilakukan telah ditemukan fakta-fakta lain yang memperkuat temuan dalam pemeriksaan investigatif yang telah dilaporkan kepada DPR. Namun substansi hasil pemeriksaan lanjutan tidak bisa disampaikan pada rapat dengan Timwas karena berdasarkan UU no. 15/2001 pasal 19, laporan harus diserahkan terlebih dahulu kepada lembaga perwakilan dalam hal ini DPR sebagai institusi.

Sementara itu anggota Timwas Century dari FPDIP Hendrawan Supratikno mengingatkan agar BPK tidak terjebak dengan tawar menawar dengan pihak-pihak yang terdesak den-

gan perkembangan kasus Century. “Kemungkinan itu ada tapi saya tidak mau berprasangka sejauh itu. Namun patut diingat temuan sementara yang BPK tadi katakan akan rekonfirmasi dengan temuan sebelumnya, bahkan mereka katakan akan membawa data lebih baik, fakta lebih kuat, itu-kan ba-

gus,” imbuhnya.

Rapat Tim Pengawas Century DPR dengan BPK juga mendapat perhatian dari beberapa mantan nasabah Bank Century. Mereka terlihat duduk dengan tertib di balkon pengunjung. Pada bagian tertentu mereka terlihat aktif menulis catatan kecil di buku notes

mereka. Anik salah seorang nasabah kepada wartawan sangat berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab dari Bank Century yang saat ini masih buron dapat segera ditangkap. “Mereka-kan katanya ada di Singapura, teroris yang dipelosok bisa dapat kenapa mereka tidak,” tandasnya. (iky)/foto:iw/parle.

Nasir Djamil Resmi Menjadi Wakil Ketua Komisi III

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso, secara khusus memimpin rapat pleno Komisi III dengan agenda tunggal penetapan Nasir Djamil sebagai Wakil Ketua Komisi menggantikan Fahri Hamzah. Pergantian ini merupakan permintaan resmi dari pimpinan Fraksi PKS yang ingin melakukan rotasi anggota mereka di parlemen.

“Apakah saudara-saudara dapat menyetujui saudara Nasir Djamil sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Priyo kepada peserta rapat di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/11). Peserta rapat kemudian menyahuti, “Setujuuu.” Setelah mengetukkan palu satu kali, Nasir Djamil dinyatakan secara resmi telah sah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam sambutan singkatnya politisi Partai Golkar ini berharap komisi yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan ini dapat menyelesaikan tugas, uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

“Saya berpesan agar Komisi III tetap pada niat awal tidak sedikitpun grogi pada berbagai kritik termasuk dari Pansel yang ingin menandingi kita, tak apa-apa,” tandasnya. Ia memastikan seluruh proses bebas dari pesan atau titipan, “Pimpinan-pun pasrah bongkok-an terserah dari mana yang akan saudara pilih itulah yang akan kita kirimkan kepada presiden.”

Rapat ditutup dengan penyerahan kembali palu sidang kepada jajaran pimpinan Komisi III yang hadir yaitu Benny K. Harman, Azis Syamsudin dan Nasir Djamil. Wakil Ketua Komisi dari FPAN Tjatur Supto Edi berhalangan hadir dalam acara tersebut.

Kepada wartawan usai rapat Nasir



Djamil menjelaskan akan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III. Ia menyebut telah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Legislasi sehingga dapat memberikan perhatian penuh pada tugas barunya ini.

Dari beberapa tantangan tugas yang dihadapi, Nasir menilai bidang

legislasi akan menjadi perhatiannya. “Bidang legislasi, penyelesaian pembahasan RUU yang menjadi beban komisi akan jadi prioritas saya. Ada RUU Sistem Peradilan Anak, revisi UU Kejaksaan, termasuk RUU KPK dan RUU Tipikor kita akan upayakan tuntas sesuai jadwal,” ujarnya. (iky) foto: tim parle

Pansel Mengaku Khilaf, Fit and Proper Test Capim KPK Dilanjutkan

Pansel (Panitia Seleksi) KPK akhirnya mengakui tidak teliti karena telah menyediakan formulir LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang kadaluarsa.



Rapat Komisi III dengan Pansel KPK membahas Fit and Proper Test calon pimpinan KPK

Pimpinan Sidang Komisi III DPR Benny K Harman (atas)

Penggunaan formulir yang masih mencantumkan pimpinan KPK periode sebelumnya itu bukanlah satu kesengajaan tapi kekhilafan, untuk itu Pansel menyampaikan permohonan maaf.

“Staf pansel ternyata tidak memeriksa formulir itu, tetapi staf tidak bisa disalahkan, pertanggungjawaban tetap pada kami. Meskipun saya bukan ketua, tapi saya mengaku Pansel salah dan harus bertanggungjawab atas hal ini,” kata anggota Pansel KPK, Imam B. Prasodjo dalam rapat dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/11).

Keterangan sosiolog Universitas Indonesia (UI) ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi III dengan memberikan tepuk tangan. Pernyataan Imam tersebut menuntaskan kisruh salah formulir LHKPN yang ditemukan pada saat fit and proper test kandidat pertama Abraham Samad. “Kalau sudah mengaku salah begini-kon sudah jelas. Kita hargai itu,” ujar pimpinan sidang Benny K Harman. Politisi Partai

Demokrat ini akhirnya meminta persetujuan peserta rapat, apakah dapat menerima penjelasan Pansel tersebut. Koor setuju segera bergema di ruangan. “Setujuu...”

Setelah menerima penjelasan Pansel KPK, anggota Komisi III sepatutnya untuk segera melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK yang sempat terhenti. Dalam pembahasan suara fraksi terbelah pada dua pilihan, memulainya pada hari Kamis (24/11) atau Senin (28/11) dengan catatan kandidat yang diuji dua orang setiap harinya.

“Kita harus tunjukkan kepada publik kita ini harus segera melaksanakan fit proper test Capim KPK dan kita buktikan keseriusannya. Saya melihat seperti rencana awal, jangan dirubah jadi setiap hari satu kandidat karena waktu yang tersedia masih cukup,” usul anggota Komisi III dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy.

Namun Syarifudin Sudding anggota Komisi III meminta pengertian karena sebagai anggota Fraksi Partai Hanura

yang juga bertugas di Badan Legislasi, ia mendapat tugas melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU Kepulauan. “Saya dan Pak Dimiyati (anggota komisi III FP3) akan menjadi ketua Tim Kunker, jadi mohon pengertian bagaimana kalau fit and proper kita lanjutkan pada hari Senin (28/11),” paparnya.

Aspirasi tersebut dapat diterima oleh sebagian besar anggota Komisi III. Pimpinan sidang Benny K. Harman akhirnya memutuskan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK akan dilanjutkan pada hari Senin (28/11). “Demi solidaritas pada anggota kita yang paling kecil, jadi ditengganglah sedikit. Maka kita mulai fit and proper calon pimpinan KPK hari Senin (28/11) dan kita tutup Jumat (2/12). Jadi hari Jumat itu komisi III sudah memilih dan menetapkan 4 calon pimpinan KPK dan kemudian memilih dan menetapkan ketua KPK yang baru. Bisa Busyro Muqoddas lagi, bisa yang lain,” demikian Benny sambil mengetukkan palu satu kali. (iky)foto:ry

Statement BPK Sejalan dengan Pansus Century

Anggota DPR Fahri Hamzah menilai, statement pimpinan BPK terhadap hasil temuan tim audit forensik aliran dana talangan Bank Century sejalan dan memperkuat temuan investigasi tim Pansus Century yang awal.

“Saya kira itu bottom line dari kesimpulan tim pengawas penuntasan kasus Bank Century DPR,” kata Fahri Hamzah (F-PKS) saat rapat Tim Pengawas Penuntasan Kasus Bank Century DPR dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara (KK-I) DPR, Rabu (23/11).

Terkait dengan peran KPK saat ini, Fahri mengatakan, kesibukan KPK bukan hanya terkait state corruption semata tetapi korupsi cerdas yang ditemukan oleh BPK seharusnya langsung mereka selidiki. “KPK terkesan tidak mau dan mungkin juga mereka tidak mampu,” sindirnya.

Senada dengan Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan) memberikan apresiasi untuk kemajuan yang telah dicatat oleh tim auditor dari BPK, apalagi temuan-temuan sementara yang sudah dikumpulkan ternyata memperkuat temuan-temuan terdahulu. “Ini sungguh menggembirakan karena nanti pada saatnya tentu kita semua akan menjadi lebih jelas terhadap temuan-temuan itu,” paparnya.

Menurutnya, ada satu track jebakan yang sering dihadapi oleh para auditor, para auditor memusatkan energinya untuk hal-hal yang sangat detail namun ternyata duduk persoalannya terlupakan. “Ibaratnya, jangan sampai kita kehilangan hutan karena kita sibuk memperhatikan pohonnya,” kata Hendrawan.

Ia meminta kepada teman-teman auditor BPK ini jangan lupa kompleks hutannya, karena persoalan ini sudah termasuk perampokan. Oleh karena itu, lanjutnya, kami di DPR siap memberikan dukungan kepada BPK. Mudah-mudahan pada saatnya tanggal 23 Desember 2011 kita semakin jelas dan BPK seperti diharapkan oleh para pegamat hukum agar lebih tegas lagi.



Jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



“Katakan itu pohon ya pohon, katakana itu hutan ya hutan, jadi lebih tegas. Kalau tidak seperti itu susah, penegak hukum juga maju mundur jadinya. Itu intinya,” tegasnya.(iw)/foto:iw/parle.

Segera Revisi UU Migas No. 22 tahun 2001

Anggota DPR RI Sohibul Iman menegaskan, DPR harus segera merevisi UU Migas No.22/2001. Prioritas tersebut beralasan karena kondisi pengelolaan sektor Migas yang semakin memburuk.

“Misalnya masalah pajak dan birokrasi yang rumit, ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), lifting minyak terus turun, realisasi investasi dan eksplorasi yang anjlok sejak 1999, tidak ditemukannya cadangan di Blok baru dalam 10 tahun terakhir kecuali Blok Cepu, produksi minyak bumi yang hanya mengandalkan lapangan-lapangan tua yang sudah matured, dan upaya efisiensi dengan teknologi EOR yang tidak memberikan dampak signifikan,” jelas Sohibul kepada parle di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi Energi ini mengingatkan, didalam UU Migas No.22/2001 sebenarnya terdapat cita-cita menata ulang sifat Pertamina sebagai perusahaan yang sekaligus regulator. Namun hasilnya, Pertamina hanya ditempat-

kan sebagai operator. Tugas sebagai regulator dan pemangku Kuasa Pertambangan diserahkan kepada institusi baru yaitu Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Implikasinya, terjadi Penerapan Pola B to G yang menghilangkan Kedaulatan Negara atas kekayaan Migasnya.

“Ini perlu kita revisi, karena membuat posisi Pemerintah sejajar dengan Perusahaan Asing/Swasta, yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Minimal ada 6 parameter agar UU Migas sejalan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang efisien berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Politik PKS ini menyebutkan 6 parameter tersebut adalah penyederhanaan sistem dengan pola B to B, proses in-

vestasi yang tidak birokratik, formula penjualan Minyak dan Gas yang menguntungkan Negara, kejelasan status kepemilikan dan pembukuan atas cadangan migas diperut bumi, prinsip Lex Spesialis dalam kebijakan fiskal, serta pengelolaan BUMN Migas yang terintegrasi.

“Apalagi dengan adanya 3 pasal dalam UU Migas No.22/2001 (pasal 22 ayat 1 tentang DMO, pasal 12 ayat 3 tentang Badan Usaha yang melakukan eksplorasi-eksplorasi, dan Pasal 28 ayat 2 & 3 tentang diserahkan-nya harga BBM dan Gas Bumi kepada mekanisme persaingan usaha) yang sudah dicabut Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan UU Migas tersebut sudah cacat secara hukum, maka revisi UU Migas perlu digesa sesegera mungkin,” jelasnya.



Migas Indonesia



Anggota Komisi Energi, Sohibul Iman

DPR Dukung GP3K Berbasis Korporasi

DPR Mendukung Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama BUMN lainnya yaitu PT Shang Hyang Seri, PT Pertani, Perum Bulog, PT Perikanan Nusantara, dan Holding PT Pupuk Sriwijaya mendapatkan dukungan dari DPR.

“Pemerintah Syaratnya, harus membuat guidance (arahan) yang jelas agar strategi yang akan diterapkan tepat sasaran dan bisa terlaksana, jelas Anggota DPR Ecky Awal Mucharam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini.

Menurutnya, kedepan anggaran APBN kita akan mengalami tekanan-tekanan terkait dengan masalah Fiskal, maka pemerintah sudah selayaknya dapat melakukan sinergi agar beban APBN terhadap BUMN bisa berkurang, sehingga APBN kedepan dapat dimaksimalkan bagi Infrastruktur dan Subsidi Energi dalam mempercepat peningkatan perekonomian bangsa.

Ecky menambahkan, yang harus segera dibenahi adalah komitmen dan kemauan dari pemerintah terkait dasar hukum dan siapa penanggung jawabnya. Apalagi, lanjut Ecky, untuk program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) ini menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

“Artinya kinerja BUMN-BUMN ini harus bisa dipertanggung jawabkan juga. Kami dari komisi VI DPR akan mendukung hal itu.” tutup Ecky.

Dalam RDP tersebut, Kementerian BUMN menyampaikan strategi meningkatkan produksi BUMN Pangan secara nasional dengan program GP3K yang meliputi : (1) Inovasi teknologi secara terpadu yang mampu mendorong produktivitas; (2) Adanya sinergi antar BUMN untuk penguatan penyediaan dan distribusi sarana produksi selain sinergi petani dengan BUMN untuk



Anggota DPR RI Ecky Awal Mucharam



penguatan receiving system akses petani terhadap modal dan penguatan untuk menerapkan teknologi secara

sempurna; (3) Penguatan administrasi berupa pencatatan seluruh petani peserta GPK.(si) foto:iw/tim parle

UU BPJS Menjamin Hak Rakyat Atas Kesehatan

Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang beberapa waktu lalu disahkan rapat paripurna DPR RI, merupakan landasan hukum bagi bagi rakyat Indonesia terhadap jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun/hari tua, dan jaminan kematian.



Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning

lah wartawan.

Dalam kunjungan tersebut tim Komisi IX DPR RI juga mengunjungi rumah sakit dan puskesmas daerah setempat, untuk melihat secara langsung kondisi rekonstruksi pembangunan dan pelayanan bagi pasien, serta pelayanan jaminan kesehatan di RSUD M. Yunus. Selain di bidang kesehatan, tim Komisi IX DPR RI juga mengunjungi Balai Pelatihan Kerja Industri di Provinsi Bengkulu.

Tim Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning (F-PDIP), didampingi Wakil Ketua Komisi Soepriyatno (F-GERINDRA), dengan anggota : Dian A Syakhroza (F-PD), Indrawati Sukandis (F-PD), Nova Riyanto Yusuf (F-PD), Subagyo Parto Diharjo (F-PD), Didik Salmijardi (F-PD), Mamat Rahayu Abdullah (F-PG), Endang Agustini Syarwan (F-PG), Nursuhud (F-PDIP), Sugianto (F-PDIP), Arif Minardi (F-PKS), Jamaluddin Jafar (F-PAN), Muhammad Iqbal (F-PPP), Chusnunia (F-PKB), dan Putih Sari (F-GERINDRA). (Tgh_Tv.P)

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning (F-PDIP) saat pertemuan dengan jajaran pemerintah provinsi Bengkulu beserta dinas dan instansi mitra komisi terkait.

Ribka menyatakan salah satu tujuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yaitu dalam rangka mensosialisasikan UU BPJS yang baru disahkan DPR. Ribka mengharapkan dengan telah disahkannya UU BPJS, pelayanan di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik, dan masyarakat Indonesia mendapatkan hak atas jaminan sosial, sesuai amanat UU No. 40 tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UUD 1945.

Ribka menambahkan, peningkatan pelayanan kesehatan juga dapat diiringi dengan peningkatan infrastruktur di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia. Perbaikan sistem dan pelaksanaan jaminan kesehatan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Askes sebagai BPJS 1 menjadi penyelenggara jaminan kesehatan bagi masyarakat. "Infrastruktur, sistem, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dilaksanakan oleh Askes," ujar Ribka saat ditanya sejumlah

Ketua DPR Resmikan Gedung Guru Kabupaten Tegal

Apresiasi disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang telah memberi perhatian penuh kepada para guru di wilayahnya. Kerjasama pemerintah dan guru menurutnya akan menjadikan daerah lebih baik, karena pembangunan sumber daya manusianya akan optimal.

“Ini luar biasa, pemda paham betul betapa penting peran guru ditengah masyarakat. Positif ketika pemerintah mendukung lahirnya guru-guru yang berkualitas di daerahnya lewat pembangunan sarana pendukung, kesejahteraan. Gurupun kemudian mendukung pemerintah dalam menjalankan programnya,” kata Marzuki saat menyampaikan sambutan dalam acara peresmian Gedung Guru, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Tegal, di Slawi, Jawa Tengah, Minggu (20/11).

Ia menilai pembangunan berjalan singkat karena partisipasi yang dihimpun dari iuran para guru dan pemda mengalir dengan lancar. Gedung baru yang akan menjadi education centre - pusat pendidikan ini menurutnya lebih baik dibandingkan gedung PGRI di daerah lain yang pernah dikunjunginya. Para guru diharapkan menggelar pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang anggarannya dapat didukung pemda. Masyarakat hendaknya juga diberi peluang untuk memanfaatkan gedung serbaguna ini untuk kegiatan olah raga atau pertemuan sosial lain.

“PGRI kelola-lah gedungnya dengan profesional, bentuk pengelola khusus yang dapat bekerja optimal. Selama ini banyak yang hanya bisa-bisa membangun tapi tidak mampu merawat,” lanjutnya. Ia meyakini PGRI mampu melakukannya karena sebagai organisasi profesi yang sebentar lagi memasuki usia 66 tahun sudah memiliki pengalaman panjang. Ketua DPR juga meminta agar organisasi guru tetap mampu menjaga independensi apalagi saat ini mulai muncul organisasi guru tandingan yang digerakkan pihak-pihak tertentu. “PGRI yang lahir



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka peresmian Gedung Guru PGRI Kabupaten Tegal, Jateng

dari bawah, jangan sampai ikut larut dalam beragam kepentingan pihak-pihak tertentu.”

Dalam laporannya Ketua PGRI Kabupaten Tegal, Waudin menjelaskan pembangunan adalah partisipasi 8623 guru anggota PGRI yang menyumbang Rp. 10 ribu/bulan selama selama 15 bulan. Ditambah bantuan pemda sebesar Rp. 450 juta terwujudlah bangunan yang total menyerap anggaran Rp. 1,7 milyar. Satu tahun sejak pelekatan batu pertama 25 Nopember 2010 gedung sudah dapat diselesaikan.

Ia juga menyebut salah satu beban para guru di Kabupaten Tegal adalah bagaimana meningkatkan partisipasi

belajar siswa sampai tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. “Data menunjukkan lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan tercatat hanya 50 persen,” tambahnya. Baginya beban itu menjadi mudah apabila kerjasama guru dan pemda berjalan baik.

Ketua DPR Marzuki Ali didampingi Ketum PB. PGRI Sulistyo dan Wakil Bupati Herry Sulistiawan berkesempatan mengikuti jalan sehat bersama masyarakat Tegal dalam rangka HUT PGRI, Korpri dan Hari Kesehatan. Panitia melaporkan sekitar 10 ribu warga memeriahkan kegiatan ini. (iky) foto: ik/parle



Wakil Ketua DPR Priyo Budhi menerima kunjungan peserta Ship for SouthEast Asian Youth Program 2011 dari sebelas negara (Jepang dan 10 anggota ASEAN) yang mengelilingi negara-negara Asia Tenggara menggunakan kapal pesiar Jepang, Fuji Maru. Ruang Paripurna, Nusantara II, 22 November 2011



Tim Kunjungan spesifik Anggota Komisi VII DPR ke Dumai Propinsi Riau yang dipimpin Sutan Sukarnotomo meninjau tempat pengolahan limbah di 3 perusahaan yaitu PT Wilmar Group, PT Cakra Alam Makmur dan PT Surya Dumai. 18-20 November 2011. Foto:Sp



Penutupan Porseni Setjen DPR, MPR, DPD 2011 dimeriahkan dengan Lomba mewarnai untuk anak-anak. 20 November 2011



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memimpin rapat Timwas Kasus Century dengan Pimpinan BPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 23 November 2011. Foto:IW